

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjelaskan mengenai beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable-variable penelitian. Berikut kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah yaitu:

“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Ni Made Diah Permata Sari & Mustanda, 2019) pengertian pendapatan asli daerah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah adalah komponen penting yang ada pada suatu daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai seluruh program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah.”

Menurut (Iqlima , 2021) pengertian pendapatan asli daerah sebagai berikut :

“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemerintahan tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan pada daerah tersebut.

2.1.1.2 Pembagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemberlakuan desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memperdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah, pad sendiri dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yaitu:

1. Pajak Daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa definisi belanja modal yaitu sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengertian belanja modal yaitu:

“Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan kapasitas dan kualitas aset”.

Menurut (Novita, Benny, Rosma, Taruli, 2020) belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun, pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, hal tersebut akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang nantinya akan berdampak baik terhadap kinerja keuangan”.

Menurut (Suryani & Pariani, 2018) belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja Modal diwujudkan dalam pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap. Aset tetap tersebut yang dimaksud adalah aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan aset tetap tersebut yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja modal yaitu pengeluaran yang berasal dari anggaran untuk memperoleh aset tetap yang berupa peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset

lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Pemandagri No.77, 2020; SAP, 2021; Sari,Nainggolan, Purba, & Saragih, 2020; Suryani & Pariani, 2018)

2.1.2.2 Jenis Belanja Modal

Dalam standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori utama, diatara sebagai berikut:

1. **Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan,pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan beberapa pengeluaran lainnya yang berhub ungan dengan perolehan hak atas tanah dan hingga tanah yang dimaksudkan dalam kondisi yang siap dipakai.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin ialah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberi manfaat lebih dari dua belas bulan hingga peralatan dan mesin yang dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja gedung dan bangunan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas hingga dalam kondisi yang siap dipakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan yang bukan kategori kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk dalam Belanja modal fisik lainnya ini diantaranya yaitu kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, hewan ternak, tumbuhan, buku-buku serta karya ilmiah.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintahan daerah yaitu keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut (Amin, 2019) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”

Menurut (Amin, 2017) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah yaitu salah satu alat untuk menganalisis tingkat pencapaian kegiatan/program dengan menggunakan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. (Pemandagri No.13,2006; Patarai, 2017; Andirfa, 2018).

2.2.2 Pengukuran Kineja keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan straegi. Pandangan tradisonal terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimalisasi biaya (input), misalnya dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan tradisonal dan beralih pada pandangan modern. Hal ini karena semua jasa dan produk yang dihasilkan pemerintah ditujuka untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. (Andirfa, 2018).

2.2.3 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program Pekerjaan internal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah pengukuran kualitatif dan kuantitatif menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. indikator yang mana kinerja ekonomi pemerintah dapat diukur adalah salah satunya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis menggunakan metode perhitungan untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam bidang keuangan pada suatu instansi, perusahaan atau organisasi selama suatu periode tertentu. Menurut Halim (2007:126) hasil analisis rasio keuangan memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
4. Mengukur tingkat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan serta pengeluaran dilakukan pemerintah dalam satu periode tertentu.

Analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Jika semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Perhitungan rasio desentralisasi fiskal dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Aset Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ini dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penggunaan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhannya. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan / atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2016). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah:

Rasio Kemandirian Daerah (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Daerah (Pemendagri 19 Tahun 2020, n.d.).

$$\text{Indeks A} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Indeks B} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio Kemandirian Daerah (Hunter, 1977).

$$\text{FAI} = \frac{\text{TrGP} + \text{TrSP} + \text{B} + \text{REVSH}}{\text{EXPI}}$$

4. Rasio Efektifitas Pendapatan

Rasio ini dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan, rasio efektifitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan

dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Mahmudi, 2016). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi pendapat dapat menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk memperoleh pendapatan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan denan realisasi penerimaan pendapatan (Mahmudi, 2016).

Rasio efisiensi pendatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pendapatan} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini tidak hanya memeperlihatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikann dana untuk program kerja, tetapi juga mencermintakn seberapa besar ketergantungan daerah pada bantuan keungan dari sumber eksternal seperti pemerintah provinssi dan pusat. Inilah yang membuat penelitian memilih indikator kemandirian sebagai fokus utama, karena indikator ini lebih dekat dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu mengevaluasi performa pemerintah daerah berdasarkan

kemampuan dalam membiayai program kerja tanpa mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, selain itu alasan peneliti menggunakan rasio kemandirian karena didukung oleh beberapa peneliti terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Kinerja Keuangan

		Desentra lisasi fiskal	keman dirian	pertum buan	efisie nsi	efektivi tas
1	Siska yulia defitri, Sindy fitria, Witra maison (2017)		√			
2	Parassela pangestu primadiva, Dini rosdini, Sri mulyani (2021)		√			
3	Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin (2015)				√	
4	Riky Setiawan, Magnaz Lestira O, Pupung Punamasari (2020)		√			
5	Ni Made Diah Permata Sari, I Ketut Mustanda (2019)					√
6	Ni Kadek Novia Indrawati Puti, Ni Putu Ayu Darmayanti (2019)			√		
7	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabila Salsa Fahira (2021)		√			
8	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020)		√			
9	Ihsan Wahyudi, Hastuti (2020)		√			
10	Ika Novita Ardelia (2022)			√		
11	Ni Ketut Ayu Anggreni & Luh Gede Sri Artini (2019)			√		
12	Novita Sari , Benny Rojeston Marnaek Nainggolan , Rosma Ariyanti Purba , Taruli Br Saragih , Wahy Banjarnahor			√		
13	Hasna Lathifah ,Haryanto (2019)	√				

14	Rian Septia Aditya Pradana		√			
15	Asih Sriwinarti, Wahyu Dwi Artaningtyas (2021)		√			

2.2.4 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (feed back) sehingga upaya perbaikan secara terus – menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk :

1. Memastikan pemahaman para pelaksanan dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja .
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan Indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja Organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan Instansi Pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel yang memiliki kesamaan dalam penelitian, kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian terkait variabel-variabel yang tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1	Siska yulia defitri, Sindy fitria, Witra maison (2017)	Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah	Variable Bebas : Kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja daerah Variable terikat : Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kekayaan daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan diakrenakan pemerintah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk pemabngunann daerah itu sendiri.
2	Parassela pangestu primadiva, Dini rosdini, Sri mulyani (2021)	Pengaruh tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap	Variable Bebas : Tingkat kekayaan, Tingkat ketergantungan	Tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap

		kinerja keuangan pemerintah	Variable Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	kinerja keuangan pemerintah
3	Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel bebas: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Variabel Terikat: Kinerja Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh
4	Riky Setiawan, Magnaz Lestira O, Pupung Punamasari (2020)	Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit Variabel Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, dan hasil opini audit hanya mampu menjelaskan adanya perbedaan masing-masing variabel tersebut terhadap kinerja keuangan. Variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja daerah dan hasil opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
5	Ni Made Diah Permata Sari, I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Terikat: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif

				terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6	Ni Kadek Novia Indrawati Puti, Ni Putu Ayu Darmayanti (2019)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Variabel bebas: PAD dan Dana Perimbangan Variabel Terikat: Kinerja keuangan Pemerintrah Daerah	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. hasil ini menunjukan bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerhja keuangan pemerintah daerah.
7	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabila Salsa Fahira (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Variabel Terikat: Kinerja keuangan Pemerintrah Daerah	Berdasarkan hasil yang didapat adalah terdapat hubungan positif yang dignifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah
8	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran (2013-2018)	Variable Bebas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana keistimewaan dan Belanja Modal Variable Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Belanja

				Modal tidak Berpengaruh signifikan positif terhadap variable Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
9	Ihsan Wahyudi, Hastuti (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat	Variable Bebas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Variable Terikat : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
10	Ika Novita Ardelia (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)	Variable Bebas : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Variable Terikat : Kinerja Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berdampak positif terhadap kinerja keuangan di pemerintah, sedangkan Dana Perimbangan berdampak Negatif Terhadap Kinerja Keuangan kinerja keuangan pemerintah
11	Ni Ketut Ayu Anggreni & Luh Gede Sri Artini (2019)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	Variable Bebas : PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Variable Terikat : Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Positif dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
12	Novita Sari , Benny Rojeston Marnaek Nainggolan , Rosma Ariyanti	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja	Variable Bebas : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan	Belanja Modal secara parsial berdampak secara relevan ke Kinerja Keuangan di Pemerintah

	Purba , Taruli Br Saragih , Wahy Banjarnahor	Keuangan	Variable Terikat : Terhadap Kinerja Keuangan	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2014-2017 Pendapatan Asli Daerah secara segmental berdampak ke Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014-2017.
13	Hasna Lathifah ,Haryanto (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	Variable Bebas : Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Variable Terikat : Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.
14	Rian Septia Aditya Pradana	Pengaruh Pendapatan Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	Variable Bebas : Pendapatan Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Variable Terikat : Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
15	Asih Sriwinarti, Wahyu Dwi Artaningtyas (2021)	<i>The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on Financial Performance of Regency/City Governments in The Special Region of Yogyakarta in</i>	Variable Bebas : Pendapatan Daerah (Pad), Dana Perimbangan, dan Belanja modal Variable Terikat : Kinerja Keuangan	Hasil diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan berpengaruh, sedangkan Belanja Modal

		2010-2019		tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah.
--	--	-----------	--	---------------------------------------------------

2.4 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintahan Daerah

pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pendapatan suatu daerah dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Putu et al., 2018). Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka berdampak pada kenaikan kinerja keuangan.

Penelitian Hasna Lathifah (Lathifa, 2019) menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian variabel Pendapatn Asli Daerah mempunyai pengaruh Positif terhadap kinerja keuangan, hal tersebut menandakan bahwa Pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila pertumbuhan pendapatan

daerah semakin meningkat maka pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan baik.

Menurut Ni kadek novia (Putri & Darmayanti, 2019) menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali hasil ini memberikan indikasi bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/ Kota Provinsi Bali memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimana bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah tersebut. Peningkatan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerah sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja keuangan yang baik.

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 13 Tahun 2006,

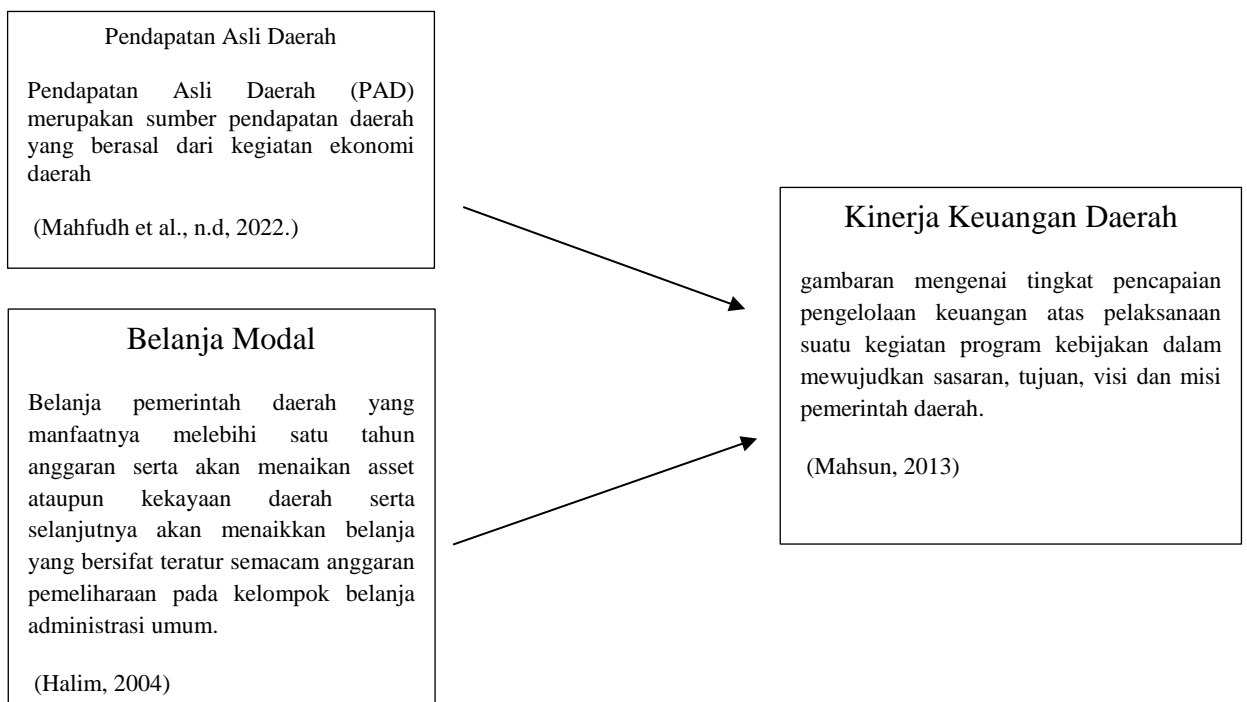
belanja modal adalah bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap daerah, Belanja modal adalah salah satu belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan pendapatan daerah dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Putu et al., 2018).

Infrastruktur yang terdapat disuatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktifitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Perkembangan pembangunan dan peningkatan aset dalam membiayai kegiatan, terutama dalam hal keuangan, dan meningkatkan modal untuk kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan daerah. Menurut Hasna Lathifah (Lathifa, 2019) Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memaksimalkan anggaran untuk belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat diwujudkan dengan meningkatkan belanja modal.

Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Semakin tingginya belanja modal yang dilakukan pemerintah terhadap pembangunan insfrastruktur dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya dapat dikatakan semakin membaik.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiono , adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 -2021.
- H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2021.